

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis penelantaran pasien oleh klinik bersalin ditinjau dari hukum Hak Asasi Manusia

1. Kasus posisi

Kasus penelantaran pasien yang terjadi di klinik bersalin milik Bidan Hj. Zubaidah Muntoha yang beralamatkan di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan terjadi pada hari senin tanggal 3 juni 2013 sekitar pukul 15.30 WIB. Pada saat itu salah seorang warga yang bernama Ibu Sukarti umur 41 tahun alamat Desa Tejowangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan hendak melakukan persalinan putra keduanya di rumah bersalin milik Bidan Hj. Zubaidah Muntoha namun pada saat itu proses penanganan persalinan diserahkan ke Bidan magang dengan alasan bahwa Bidan Hj. Zubaidah Muntoha hendak menghadiri panggilan dinas oleh Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Kabupaten Pasuruan. Proses persalinan tersebut dilakukan oleh Bidan magang, namun meskipun bidan magang tersebut sudah dibekali ilmu dari kampus yang bersangkutan, kurangnya pengalaman menjadi salah satu penyebab meninggalnya pasien tersebut akibat mengalami pendarahan hebat. Kakak kandung korban yang bernama Sumarmi mengatakan bahwa adik saya (Ibu Sukarti) mengalami pendarahan hebat, namun Bu Bidannya malah pergi tanpa pamit. Puluhan warga Desa Tejowangi sempat mendatangi Klinik Bersalin tersebut dan menuntut agar Klinik Bersalin tersebut ditutup lantaran dianggap tidak bisa

menangani pasien dengan profesional dan tidak mendahulukan kepentingan pasien. Keluarga Alm. Sukarti serta puluhan warga sempat mengadukan kasus ini ke Polsek Purwosari guna mencari keadilan dan berharap agar kasus ini ditangani secara hukum oleh aparat yang berwenang. Kapolsek purwosari, AKP Heri Pudjianto mengatakan akan segera menindaklanjuti dugaan kasus penelantaran pasien tersebut dan akan memproses sesuai hukum yang berlaku, yaitu Pasal 359 KUHP subs Undang Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang mana ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,-.

2. Analisa kasus ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia

Mengacu pada kasus diatas, apa yang dilakukan oleh Bidan Hj. Zubaidah Muntoha ketika meninggalkan pasiennya yang hendak melakukan persalinan dan menyerahkan proses persalinan tersebut kepada bidan magang merupakan salah satu bentuk kurangnya sikap profesionalisme dan merupakan bentuk kelalaian, dimana jika kita mengacu pada Kode Etik profesi kebidanan Indonesia bagian 1 huruf (d) yang mengatakan bahwa Setiap Bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai nilai yang dianut oleh klien. Hal ini jelas sekali bahwa apa yang tertulis dalam kode etik kebidanan bagian 1 huruf (d) bahwa setiap bidan wajib dan harus mendahulukan kepentingan klien agar terciptanya proses persalinan yang aman untuk ibu dan bayi. Dalam kasus diatas, ketika pasien datang dengan tujuan hendak melakukan persalinan, maka seharusnya Bidan sebagai tenaga medis yang profesional

harus mendahulukan kepentingan klien. Dalam penjelasan Kode Etik Kebidanan, kepentingan klien berada diatas kepentingan diri sendiri maupun kelompok, artinya bidan harus mampu menilai situasi saat ia menghadapi kliennya dan mengutamakan pelayanan yang dibutuhkan klien dan mereka tidak boleh ditinggal begitu saja.²⁹

Tindakan atau keputusan yang diambil oleh bidan pada saat melakukan tindakan pertolongan persalinan sangatlah penting bagi keselamatan ibu dan bayi. Tindakan yang akan dilakukan hendaknya harus sesuai dengan Standar Profesi Kebidanan yang diatur didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang mana tenaga kesehatan wajib mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan, dan membuat serta memelihara rekam medik. Hak pasien yang dimaksud adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Kasus diatas pada dasarnya sudah termasuk kedalam ranah hukum pidana, menurut penulis, apa yang dilakukan oleh Bidan Hj. Zubaidah Muntoha merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 359 KUHP dijelaskan bahwa “ barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana

²⁹Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi. 2007. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hal.48.

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Bidan Hj. Zubaidah Muntoha telah terbukti lalai dengan sengaja meninggalkan pasiennya dan menitipkan pasiennya kepada bidan magang yang mengakibatkan pasiennya mengalami pendarahan hebat sehingga nyawa pasien tidak terselamatkan.

Dinas kesehatan kabupaten pasuruan juga telah menggelar sidang kode etik profesi terhadap bidan Hj. Zubaidah Muntoha yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Loembini pedjati ajoeng pada hari jum'at tanggal 14 juni 2013 yang juga dihadiri oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diketahui bahwa secara prinsip terkait tindakan dalam hal standart pertolongan persalinan sudah dilakukan oleh Bidan Hj. Zubaidah Muntoha, ketika pasien datang ketempat rumah bersalin sudah diberikan pertolongan awal dengan memasang infus, sedangkan waktu itu, perkiraan Bidan Hj. Zubaidah Muntoha pasien baru akan melahirkan pada sore harinya, sehingga pada waktu itu ditinggal terlebih dahulu dan pasien dititipkan kepada bidan magang. Dari hasil sidang etik profesi tersebut telah diputuskan bahwa Bidan Hj. Zubaidah Muntoha bersalah dan tidak diizinkan melangsungkan aktifitas pengobatan, menerima pasien, ataupun membuka praktek kesehatan pribadi selama kurun waktu 3 bulan. Selain itu Bidan Hj. Zubaidah Muntoha juga menjalani proses pembinaan secara khusus oleh Ikatan Bidan Indonesia

yaitu pembinaan tentang Etika kebidanan dan juga pembinaan tentang prosedur standart pelayanan kebidanan.

Ditinjau dari hukum Hak Asasi Manusia, kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, untuk mewujudkan kondisi badan yang sehat diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah maupun pemerintah daerah, instansi penyelenggara pelayanan kesehatan dan juga masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata untuk seluruh masyarakat. pelayanan kesehatan itu sendiri diatur didalam beberapa instrument nasional diantaranya Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu didalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sedangkan didalam pasal 9 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia dinyatakan bahwa 1) setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penelantaran pasien merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas dapat

disimpulkan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak hak nya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang hak nya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak memperoleh pendidikan demi masa depan nya maupun anak anaknya. Seperti pada kasus penelantaran pasien diatas, akibat dari adanya perbuatan lalai dari Bidan mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup seseorang, selain itu, perbuatan bidan tersebut juga telah melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam pasal 58 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

3. Alternatif penyelesaian sengketa

Sengketa yang terjadi antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan permasalahan yang timbul akibat adanya hubungan dalam rangka rangka melakukan upaya penyembuhan dimana diakibatkan adanya ketidakpuasan pasien pada umumnya yang disebabkan oleh dugaan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tugas profesi, hal

ini terjadi karena kurangnya informasi yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban keduanya. Maka dari itu peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa sangat diperlukan suatu penyelesaian masalah yang terukur dan memiliki kredibilitas yang mampu mengakomodasi sengketa dalam pelayanan kesehatan dengan tetap mengutamakan kesepakatan atau mufakat yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai yang telah disebutkan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya penyelesaian sengketa ini lebih dikenal dengan istilah *alternatif dispute solution* (ADS). Alternatif penyelesaian sengketa adalah salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dipengadilan negeri. Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, dan penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa dalam kasus ini, pihak keluarga korban memilih untuk menempuh jalur mediasi, dikarenakan adanya itikat baik dari pemerintah, dinas kesehatan, dan juga bidan yang bersangkutan. Itikat baik yang dimaksud penulis adalah bentuk daripada tanggungjawab dan juga pemberian kompensasi baik dari pemerintah daerah, instansi, maupun bidan

yang bersangkutan yang diberikan kepada keluarga korban. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak keluarga korban, pihak keluarga korban mengatakan bahwa pada saat itu pihak keluarga ingin membawa kasus tersebut menuju jalur hukum, namun setelah adanya mediasi antara pihak keluarga korban dengan pihak bidan yang di mediasi oleh kepala desa tejowangi, akhirnya disepakati bahwa dari pihak keluarga korban mencabut perkara yang masuk dikepolisian dan mengikhlaskan meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka serta pihak keluarga juga menerima santunan atau kompensasi yang diberikan oleh pihak bidan yaitu uang tunai sebesar 25.000.0000, selain itu pihak bidan juga mengurus semua biaya pemakaman Alm. Sukarti sebagai korban, selain santunan dari bidan keluarga Alm. Ibu sukarti juga mendapat santunan dari dinas kesehatan pasuruan sebesar 7.500.000 dan dari pemerintah daerah kecamatan purwosari keluarga mendapat santunan sebesar 5.000.000.

Menurut hemat penulis, pemberian kompensasi tersebut diatas tidak dapat menggantikan kerugian yang sudah dialami keluarga korban, sebab pada dasarnya nyawa seseorang tidak dapat diukur dengan uang. Seharusnya proses hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah tertulis didalam KUHP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yaitu Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun. Jelas sekali bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bidan Hj. Zubaidah Muntoha

sudah memenuhi unsur unsur yang ada didalam pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya), menyebabkan matinya orang sehingga sangat pantas sekali apabila pelaku dikenakan pasal 359 KUHP. Kesalahan (kealpaan) yang dimaksud disini adalah Bidan Hj. Zubaidah Muntoha telah keliru dalam memprediksi waktu proses persalinan korban dan meninggalkan korban dirumah bersalin miliknya, selain itu Bidan Hj. Zubaidah Muntoha menitipkan proses persalinan korban kepada bidan magang yang masih kurang pengalaman, sehingga atas tindakan Bidan Hj. Zubaidah Muntoha tersebut koban atas nama ibu sukarti mengalami pendarahan hebat sehingga nyawanya tidak tertolong.

B. Tanggung jawab serta pemenuhan hak atas kompensasi bagi korban penelantaran pasien oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan

1. Tanggung jawab pemerintah

Bentuk tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah di sektor kesehatan adalah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. didalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa :

Pasal 14 :

(1) pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

(2) tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15 :

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan yang baikmaupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya.

Pasal 16 :

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya.

Pasal 17 :

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi tingginya.

Pasal 18 :

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 19 :

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 20 :

- (1) pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui system jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan system jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kesehatan termasuk kedalam lingkup pelayanan publik. Oleh sebab itu, khusus pada pelayanan publik ini kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah terjaminnya :

- a. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
- b. Ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
- c. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
- d. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- e. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

- f. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui system jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan system jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas kesehatan kabupaten atau kota merupakan penanggung jawab salah satu penyedia pelayanan kesehatan juga berkewajiban dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khusus nya ditingkat puskesmas ataupun klinik kesehatan sebagai pelayanan kesehatan ditingkat kecamatan. Dinas kesehatan dalam hal ini perlu mengadakan evaluasi dan juga penilaian untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Terkait dengan adanya kasus penelantaran pasien yang terjadi di desa martopuro kecamatan purwosari kabupaten pasuruan, dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten pasuruan sudah mengambil langkah langkah guna menyelesaikan permasalahan ini dengan cara memanggil bidan yang bersangkutan dan juga memberikan arahan atau pembinaan serta meminta kepada dinas kesehatan pasuruan untuk membantu melakukan pembinaan agar untuk kedepannya kejadian seperti ini tidak akan terulan kembali.

Proses pembinaan terhadap bidan yang bersangkutan ditangani langsung oleh dinas kesehatan kabupaten pasuruan bersama dengan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), proses pembinaan tersebut meliputi tentang bagaimana pelayanan terhadap pasien sesuai dengan norma norma yang

dianut oleh pasien yang meliputi norma agama, norma hukum, norma etik (sopan santun, adat istiadat, dan lain lain) dan tidak melanggar ketentuan hokum (malpraktik) serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik kebidanan, pembinaan tentang penanganan proses persalinan yang aman, pembinaan tentang penanganan setelah proses persalinan, pembinaan tentang persiapan obat obatan dan juga rujukan apabila terjadi hal hal yang bersifat darurat.

2. Pemenuhan hak atas kompensasi

Pemenuhan hak atas kompensasi sangat erat kaitannya dengan hukum positif di Indonesia yang mana telah diatur didalam kitap undang undang hukum perdata, aspek keperdataan pada hukum kesehatan bertumpu pada salah satu asas dalam hukum kesehatan yaitu Hak Asasi Manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Didalam pasal 58 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Pada awalnya masalah kesehatan merupakan masalah individual/ pribadi, namun karakter individual ini mulai luntur dikarenakan persoalan kesehatan ini bukan masalah pribadi, akan tetapi masyarakat juga ikut didalamnya. Dalam hal yang berkaitan dengan persoalan persoalan kesehatan banyak masalah yang timbul antara petugas kesehatan dengan pasien. Terkait kasus diatas seperti yang dialami oleh Alm. Ibu sukarti, pasien yang hendak

melakukan persalinan disebuah klinik bersalin milik Bidan Hj. Zubaidah Muntoha bisa dibilang atau masuk kedalam katagori malpraktek, dikarenakan adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh Bidan Hj. Zubaidah Muntoha dengan meninggalkan pasien yang hendak melakukan persalinan dan menitipkan pasien kepada bidan yang magang merupakan suatu kelalaian yang menyebabkan pendarahan hebat yang dialami oleh korban hingga nyawanya tidak tertolong.

Bentuk daripada tanggungjawab dan juga pemberian kompensasi baik dari pemerintah daerah, instansi, maupun bidan yang bersangkutan yang diberikan kepada keluarga korban. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak keluarga korban, pihak keluarga korban yang diwakili oleh suami Alm. Sukarti mengatakan bahwa pihak keluarga menerima santunan atau kompensasi yang diberikan oleh pihak bidan yaitu uang tunai sebesar 25.000.0000, selain itu pihak bidan juga mengurus semua biaya pemakaman Alm. Sukarti sebagai korban, selain santunan dari bidan keluarga Alm. Ibu sukarti juga mendapat santunan dari dinas kesehatan pasuruan sebesar 7.500.000 dan dari pemerintah daerah kecamatan purwosari keluarga mendapat santunan sebesar 5.000.000. pihak keluarga korban juga sudah mengikhlaskan kejadian yang menimpa Alm. Ibu Sukarti dan memilih jalan damai dengan di bantu mediasi oleh kepala Desa Tejowangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

